

**TRACK RECORD SEKOLAH TEOLOGI: ANUGERAH
KARYA ALLAH MULAI DARI KETERBATASAN
MENDIDIK CALON ROHANIWAN SAMPAI
PENERIMAAN LULUSANNYA OLEH GEREJA DAN
LEMBAGA KRISTEN**

JAHJA ELIA PILIMON

LATAR BELAKANG KAJIAN

Trinity Evangelical Divinity School (TEDS) yang berdiri sejak tahun 1897 adalah lembaga pendidikan teologi berakreditasi yang bertaraf internasional. *Track record* untuk lulusan TEDS yang “terpakai” oleh lembaga-lembaga Kristen adalah: 85% dari lulusannya, dalam waktu setengah tahun, telah menduduki posisi pelayanan di gereja dan berbagai lembaga Kristen.¹ TEDS yang mempunyai reputasi internasional ini, diinformasikan oleh Rick Kalal,² mendapat kritikan dari para pendeta “gereja-gereja besar pemakai lulusan TEDS.” Kritiknya adalah: Para lulusan TEDS hanya bisa mengeksegeisis Alkitab tetapi kurang mampu mengeksegeisis budaya; tahu membaca bahasa Yunani dan Ibrani, tetapi kurang matang dalam spiritual, keterampilan keorganisasian dan penggembalaan untuk dapat menjadi pemimpin rohani yang efektif. Tindakan kritik tersebut dilanjutkan dengan “ancaman”: jika lulusan TEDS berikutnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, maka mereka akan mendirikan sekolah teologi sendiri, alias tidak akan menerima lagi “pasokan” rohaniwan lulusan TEDS.

Dari kritikan dan “ancaman” pimpinan gereja terhadap TEDS di atas terlihat bahwa pihak gereja “pemakai” meminta agar lulusan TEDS ketika masuk di ladang pelayanan telah “siap-pakai,” bukan dalam kondisi hanya “pandai khotbah.” Kritikan tidak “siap pakai” tersebut meliputi ranah kognitif (hal eksegeisis), ranah afektif (hal kematangan spiritual), dan ranah praksis (hal keterampilan keorganisasian dan penggembalaan) yang memang merupakan kualifikasi yang harus dimiliki seorang rohaniwan³ yang lulus

¹Katalog TEDS 2000-2001.

²“We’ve Got Trouble,” *Christian Education Journal* 3/1 (Spring 1999) 55-79.

³Ibid.

dari sekolah teologi.⁴ Pada umumnya, sekolah-sekolah teologi mendapat kritikan, antara lain, “tidak mempunyai arah,” “pengajarnya bersaing,” “kurikulumnya tidak relevan dengan kehidupan nyata,” “penyiapan pelayanan para lulusannya buruk.”⁵ Robert Banks mengemukakan bahwa beberapa organisasi awam menyatakan keluhannya terhadap pendidikan teologi formal yang dinilai tidak cukup menyiapkan rohaniwan-rohaniwan yang dapat membantu mereka menghadapi persoalan hidup mereka sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, secara kristiani.⁶

Pertanyaannya sekarang: Apakah kritikan terhadap TEDS yang dianggap hanya menekankan ranah kognitif tersebut dapat ditelusuri indikasinya pada TEDS? Tampaknya, data yang diperoleh menunjuk ke arah tersebut. *Pertama*, secara langsung terlihat dari salah satu tujuan pendidikannya, yaitu “*to demonstrate the highest level of academic excellence*” dan pernyataan pejabat yang sedang memimpin: “. . . *we intentionally seek to challenge students intellectually because a vital part of Christ’s greatest command is ‘to love God with our minds’.*”⁷ *Kedua*, secara tidak langsung, hasil penelitian Richard Mouw mengungkapkan bahwa pada umumnya, “*divinity schools*” (seperti TEDS) memandang dirinya lebih berhubungan dengan hal akademik daripada masalah ke-gereja-an.⁸ Jika indikasi itu benar, berarti TEDS telah meluluskan rohaniwan-rohaniwan yang tidak seimbang ranah-ranah kualifikasinya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan evaluasi kualifikasi kelulusan calon rohaniwan antara sekolah teologi dan lembaga “pemakai” yang menunjukkan ketidakmudahan upaya mengevaluasi calon rohaniwan, baik dari segi alat maupun dari segi keterampilan. Tetapi, jika melihat *track record* 85% lulusannya tetap diterima oleh gereja-gereja dan lembaga Kristen lainnya, maka timbul tiga pertanyaan. *Pertama*, apakah komunitas lembaga “pemakai” menerima lulusan sekolah teologi tersebut, yang walaupun tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diharapkan (taraf *mediocre* saja), namun tetap “memakainya” karena gereja membutuhkan? *Kedua*, apakah komunitas lembaga “pemakai” sebenarnya bangga dengan “ke-intelektualan” rohaniwan sebagaimana penerimaan profesi dunia sekuler pada umumnya? *Ketiga*, apakah para lulusan TEDS, berdasar karya anugerah

⁴John M. Buchanan, “Basic Issues in Theological Education,” *Quarterly Review* 13/3 (Fall 1993) 45-55.

⁵Robert Ferris dalam Phil Howard, “Theological Education: Perspectives from the Literature,” *Christian Education Journal* 3/1 NS (Spring 1999) 9; dalam D. W. Wright, “The Social Context of the Renewal Problem in Theological Education: Probing Beyond the Symptoms of Failure,” *Christian Education Journal* 15/3 (Spring 1995) 87-98.

⁶*Reenvisioning Theological Education* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999) 11.

⁷Katalog TEDS 2000-2001.

⁸Dikutip dari Banks, *Reenvisioning Theological Education* 209.

Tuhan, bukan karya sekolah teologi, makin lama makin bertumbuh menjadi rohaniwan yang relatif seimbang persyaratan kualifikasinya sehingga “pemakai” tetap “memakai” untuk seterusnya?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas secara kuantitatif diperlukan data *track record* mengenai penilaian komunitas Kristen terhadap kualifikasi rohaniwan lulusan TEDS yang melayani mereka: (1) berapa persentase lulusan TEDS yang bertahan melayani sampai pensiun dengan penilaian kualifikasi taraf “cukup,” “sedang” atau “kurang” secara keseluruhan ataupun berdasarkan setiap ranah; (2) berapa persentase yang tidak melanjutkan pelayanan; (3) berapa perkiraan persentase energi, tenaga, waktu yang telah digunakan gereja untuk “mengurusi persoalan rohaniwan,” dan untuk pengembangan gereja ke dalam dan ke luar; data tersebut, sayangnya, belum didapatkan penulis. Jika mengingat TEDS adalah lembaga pendidikan bertaraf internasional maka persentase jawaban untuk pertanyaan pertama kemungkinannya kecil. Kalau jawaban atas pertanyaan kedua adalah ya, berarti gereja-gereja tersebut tidak sehat dan harus diperbaharui. Kalau jawaban atas pertanyaan ketiga yang benar, berarti sekolah-sekolah teologi yang sudah sungguh-sungguh berusaha menyiapkan lulusannya untuk memenuhi kualifikasi seorang rohaniwan, harus mengakui bahwa “dipakainya” lulusan mereka oleh lembaga “pemakai” bukan karena hasil upaya mereka mendidik, tetapi semata-mata karena karya anugerah Tuhan dalam diri para lulusannya.

Dari kritikan-kritikan yang disampaikan kepada sekolah tersebut terlihat ada tiga ketidakmudahan sekolah teologi dalam menyiapkan calon rohaniwan. *Pertama*, tidak mudah mengajar para calon rohaniwan mengenai “biblika,” sejarah gereja, teologi sistematika, dan teologi praktika sampai mereka memiliki keterampilan untuk menginterpretasikannya ke dalam konteks hidup sehari-hari. Keterampilan ini merupakan sesuatu yang mereka butuhkan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran tersebut kepada jemaat yang dilayani sehingga jemaat, sebagai orang percaya, dapat menghadapi persoalan hidup mereka sehari-hari.

Kedua, tidak mudah mengajar calon rohaniwan memahami gereja atau jemaat, yang mencakup apa masalah gereja sendiri, bagaimana mengelola dan menggembalakan jemaat dan bagaimana jemaat bergereja; bagaimana konteks kehidupan jemaat sehari-hari, pribadi maupun kelompok, apa masalahnya, bagaimana mereka sebagai orang Kristen menghadapi masalah-masalah tersebut; bantuan apa yang mereka perlukan dari rohaniwan sebagai gembala dan pemimpin-pelayan. Ketidakmudahan ini disebabkan hal-hal yang akan dihadapi sifatnya setempat. *Ketiga*, tidak mudah mengajarkan dan menyeimbangkan secara utuh ketiga ranah kualifikasi yang harus dimiliki seorang rohaniwan; khususnya mengajarkan ranah afektif yang tidak mudah dievaluasi baik di kampus maupun di tempat magang.

Ketidakmudahan-ketidakmudahan upaya mendidik calon rohaniwan dan mengevaluasi kualifikasi lulusannya jelas merupakan keterbatasan-keterbatasan sekolah teologi. Jika sekolah-sekolah teologi menerima keterbatasan-keterbatasan tersebut secara reflektif, maka hal itu akan menumbuhkan kesadaran dan sikap kritis terhadap keterbatasan-keterbatasan tersebut, baik pada aspek-aspek upaya mendidik maupun pada dimensi kronologi upaya mendidik yang dimulai dari penyaringan calon peserta didik sampai yang bersangkutan diterima oleh lembaga-lembaga “pemakai.” Kesadaran tersebut akan bermuara pada pengakuan dari sekolah-sekolah teologi bahwa *track record* diterimanya lulusan mereka di lembaga-lembaga “pemakai” semata-mata hanyalah anugerah karya Allah sebagaimana dinyatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3: 6-7: “Aku (Paulus) menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.”

Paparan selanjutnya akan menunjukkan catatan pelayanan para rohaniwan di lembaga-lembaga “pemakai,” khususnya gereja, yang kelemahan-kelemahannya selalu dikembalikan pada lembaga yang mendidiknya, yaitu sekolah teologi. Setelah itu akan ditunjukkan catatan keterbatasan-keterbatasan proses pendidikan mulai dari penyaringan peserta didik baru, proses pendidikan, magang, sampai kegiatan evaluasinya.

MASALAH DALAM DIRI JEMAAT DAN MASALAH YANG DIHADAPI JEMAAT

Masalah yang dihadapi jemaat tentunya sangat banyak, baik masalah individu, antarindividu, maupun masalah jemaat sebagai kelompok. Lingkungan teknologi dan sosial kemasyarakatan non-Kristen juga merupakan masalah yang dihadapi jemaat. Dalam artikel ini hanya akan dikemukakan masalah kehidupan rohani jemaat sebagai “senjata” dalam menghadapi persoalan hidup mereka sehari-hari dan masalah modernitas yang dihadapi jemaat, yang kesemuanya dikaitkan dengan pembinaan hidup kristiani yang diberikan rohaniwan sebagai pemimpin Kristen.

Masalah Kehidupan Rohani Jemaat Dikaitkan dengan Pembinaan Hidup Kristiani oleh Rohaniwan

Gayle Carlton Felton mengemukakan bahwa banyak gereja tidak melibatkan jemaatnya, khususnya pemuda masa akhir dan orang dewasa, dalam pengalaman pendidikan yang bermakna.⁹ Hasil penelitian Benson dan Eklin, yang dikutip oleh Felton, mengenai iman, kesetiaan, dan kehidupan jemaat menunjukkan bahwa hanya 28% jemaat dewasa yang berpartisipasi dalam pendidikan Kristen formal.¹⁰ Kebanyakan jemaat dewasa yang pergi ke gereja setiap hari Minggu hanya menghabiskan waktu antara 11 sampai 12 jam selama setahun dalam kegiatan pendidikan keagamaan. Sebaliknya, sekurang-kurangnya 60% anak-anak umur sekolah dasar berpartisipasi dalam pendidikan Kristen formal. Felton menyimpulkan: (1) kebanyakan jemaat pemuda dan orang dewasa kurang matang dalam iman yang dapat mendukung dan mengingatkan kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang percaya; dan (2) jemaat yang paling potensial yang mempengaruhi perkembangan iman dan komitmennya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam suatu program pendidikan Kristen yang efektif. Kondisi ini dinyatakan sebagai indikator krisis kelemahan para rohaniwan dalam pengajaran iman pada jemaat. Kondisi ini dapat dinyatakan dalam kalimat lain yang diungkapkan oleh Felton: “adalah suatu perbedaan antara apa yang para lulusan teologi ketahui dengan apa yang mereka dapat ajarkan.”¹¹ Robert W. Ferris menyatakan bahwa perlengkapan yang diberikan para pemimpin Kristen kepada jemaatnya untuk dapat mengartikulasikan pesan Alkitab kepada budaya modern dan posmodern adalah sangat buruk.¹² Krisis ini dikembalikan oleh para penulis sebagai kelemahan pengajaran calon rohaniwan di sekolah teologi.

Bersamaan dengan hal di atas, Richard D. N. Dickinson¹³ menyatakan bahwa tantangan gereja dan sekolah teologi adalah masalah pluralitas dalam lingkungan kekristenan sendiri, yaitu masalah kesatuan atau ekumene berbagai denominasi gereja yang mempunyai tanggung jawab bersama dalam memperhatikan kemaslahatan generasi berikutnya yang tinggal di bumi yang

⁹“Challenges to the Teaching Ministry in the Contemporary Church,” *Quarterly Review* 15/2 (Summer 1995) 175-183.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²“The Social Context of the Renewal Problem in Theological Education: Probing Beyond an Epistemology of Despair,” *Christian Education Journal* 15/3 (Spring 1995) 99-103.

¹³“Christian Theological Seminary Facing the Next Millenium,” *Mid-Stream* 33/2 (April 1994) 205-213.

satu yang harus dipelihara, dan dalam mengantisipasi globalisasi yang telah membuat banyak hal berjarak menjadi lokal. Terwujud tidaknya ekumene gereja dinyatakan sebagai tanggung jawab sekolah-sekolah teologi. Pertanyaannya adalah: Bisakah sekolah-sekolah teologi membangun semangat ekumene dalam kondisi pluralitas kekristenan dengan kaitan-kaitannya pada para peserta didiknya? Paparan berikut yang dihadapi jemaat adalah masalah pluralisme yang datangnya dari konteks kehidupan jemaat di tengah-tengah masyarakat luas serta implikasinya.

*Masalah Modernitas yang Dihadapi Jemaat: “Teknologi dan Pluralisme”
Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Rohaniwan Sebagai Pemimpin Kristen*

Neil E. Pembroke dalam artikelnya, “John Stott and Erik Erikson on the Problem of Modernity: Applications for the Ministry of the Church,”¹⁴ membahas pandangan kedua tokoh tersebut—yang seorang adalah teolog dan yang lain psikolog—terhadap masalah-masalah zaman modern ini dan perhatian para pendeta terhadap jemaatnya dalam pembangunan sikap yang diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Dua masalah utama yang dikedepankan adalah masalah teknologi dan pluralisme. Masalah teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan alam bagi generasi yang akan datang, penggunaan senjata nuklir, komunikasi massa dan dunia yang cepat berubah yang berdampak pada rasa tercabut dari lingkungan hidup sendiri. Selain hal-hal tersebut, perlu diberi catatan di sini bahwa yang berkaitan dengan masalah komunikasi massa masih banyak, antara lain, pergaulan bebas, pornografi dan konsumerisme. Masalah pluralisme berdampak pada kehidupan keimanan yang lebih sulit yang meliputi bagaimana hidup bersama dalam masyarakat yang multibudaya dan *multi world-view*—yang mudah memunculkan prasangka, kebencian dan bahkan kekejaman—secara konstruktif.

Sikap apa yang harus dibangun oleh seorang rohaniwan pada diri jemaatnya terhadap kedua masalah di atas? Pembroke mengedepankan pendapat Erikson yang mengemukakan dua sikap yang dipertegas isinya oleh Stott, yaitu *responsibilitas* yang berhubungan dengan masalah teknologi, dan sikap bijak (*judiciousness*) yang mengandung makna toleran atau berdaya tahan terhadap keberbedaan, cermat dan metodik dalam mengevaluasi, tepat dalam pertimbangan, berhati-hati dalam tindakan, dan berpendirian yang berhubungan dengan masalah pluralisme. Sikap *responsibilitas* terhadap penggunaan teknologi berkaitan dengan bumi sebagai tempat hidup manusia. Secara teologis, sikap ini mencakup aspek

¹⁴*Journal of Psychology & Theology* 18/3 (Fall 1990) 237-243.

etika hidup dengan sesama sebagai umat manusia yang telah diberikan bumi oleh Tuhan sebagai tempat hidup (Kej. 1:26, 28; Mzm. 115:16) dan aspek pertanggungjawaban terhadap Allah yang adalah pemilik bumi ini (Mzm. 24: 1) dengan memperhatikan kelayakan bumi sebagai tempat hidup yang sejahtera bagi generasi umat manusia selanjutnya.

Berkaitan dengan pengaruh teknologi pada efek komunikasi massa dan perubahan hidup yang sangat cepat, jemaat harus dibantu untuk membangun identitas yang berdaya tahan tinggi. Sikap bijak diperlukan untuk menghadapi pluralisme yang mudah menimbulkan prasangka, kebencian dan kekejaman dalam dunia modern yang penuh sikap apatis, prasangka, dan kerelatifan yang, patut disayangkan, juga sudah melanda gereja. Erikson menyatakan tidak mudah untuk hidup secara “*judicious*,” dan hal yang tidak mudah ini merupakan tanggung jawab para rohaniwan sebagai pemimpin jemaat dan pemimpin Kristen untuk membangunnya, dan itu harus dimulai dari diri rohaniwan itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah modernitas di atas, bangsa Indonesia, termasuk umat Kristen, juga sedang menghadapi masalah penggunaan teknologi di “tanah air” Indonesia sebagai tempat hidup yang telah dirusak oleh generasi terdahulu dan juga generasi sekarang, khususnya perusakan hutan dan laut serta pencemaran udara. Perusakan dan pencemaran ini sudah tentu harus dipertanggungjawabkan oleh generasi sekarang kepada generasi berikut yang akan mewarisinya. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi masalah pluralisme yang sudah menimbulkan prasangka, kebencian, dan kekejaman. Dalam kesempatan ini, yang ingin disoroti hanyalah masalah pluralisme di bidang pendidikan berkenaan dengan keputusan politis negara, yaitu dihilangkannya istilah “ciri khas” bagi perguruan swasta dalam GBHN 1998.¹⁵ Ciri khas perguruan swasta tersebut telah memberikan hak kepada lembaga pendidikan Kristen untuk hanya memberikan pelajaran agama Kristen pada semua peserta didik, termasuk yang tidak beragama Kristen yang mau belajar di lembaga tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah upaya para pimpinan Kristen melalui pendekatan politik sosial-kemasyarakatan yang selama ini dilakukan telah cukup untuk menjawab pertanyaan: “Apakah makna ciri khas perguruan swasta seperti itu yang menentukan penyebutan sebuah sekolah Kristen adalah Kristen?” Apakah masalah ini dapat dijawab umat Kristen

¹⁵Keputusan Sidang Pleno Majelis Pusat Pendidikan Kristen/MPPK tanggal 7-10 Oktober 1998; “Ciri Khas Perguruan Swasta Diminta Masuk TAP MPR 1998,” *Suara Pembaruan* (15 Oktober 1998); Siaran Pers Pengurus Harian MPPK (sekarang MPK), “Jangan Hilangkan Ciri Khas Perguruan Swasta,” *Suara Pembaharuan* (4 Mei 1999); Weinata Sairin, *Pesan-pesan Kenabian di Pusaran Zaman* (Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI bekerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 2002) 78-81.

dengan sikap “*judicious*” di atas? Apakah kondisi yang tidak mudah ini justru merupakan waktunya bagi gereja dan sekolah teologi untuk membahas apa yang disebut “Sekolah Kristen” dalam konteks negara Indonesia yang majemuk ini? Hasil bahasan tersebut jelas dapat dipakai sebagai pedoman umum bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk merefleksi dan merekonstruksi ide pendidikan yang dipegang selama ini.

Demikian pula halnya dengan ajakan para pimpinan berbagai agama untuk mewujudkan pendidikan agama yang inklusif dalam rangka meredam konflik antarumat beragama di beberapa daerah di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Salah satu tulisan mengenai hal tersebut adalah dari Yonky Karman.¹⁶ Ditegaskan dalam tulisannya bahwa agama seharusnya bisa memberikan kontribusi positif bagi *nation building* dengan cara menggali spiritualitas sosialnya supaya umat beragama mampu menerima perbedaan dan hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat majemuk. Apakah ajakan yang simpatik ini juga dapat dijawab dengan sikap “*judicious*” untuk tetap bisa memberitakan kabar baik, dan bersamaan dengan itu tetap bisa memelihara kerukunan antarumat beragama dan mewujudkan HAM? Sebelum menjawab pertanyaan ini, bersama dengan masalah teknologi, pertanyaan berikut perlu dijawab lebih dahulu: Apakah masalah teknologi, ekologi, pluralisme, responsibilitas dan sikap bijak telah dibangun di sekolah teologi dengan mengikutsertakan para peserta didiknya, bukan sekadar didiskusikan dan direfleksikan dalam kelas pelajaran etika, filsafat pendidikan Kristen, atau mata kuliah lain yang terkait?

Perlu dikemukakan di sini bahwa selain masalah teknologi dan pluralisme, jemaat juga menghadapi masalah keilmuan, khususnya tentang teori asal-usul manusia. Dalam jurnal ilmiah *Nature* terbaru,¹⁷ dilaporkan temuan tanggal 19 Juli 2001 mengenai fosil tengkorak nenek moyang manusia yang diduga berusia enam sampai tujuh juta tahun di padang pasir Djourab di Chad, Afrika Tengah. Tengkorak tersebut oleh tim penemu diberi nama *Toumai* yang berarti “harapan hidup.” Selain teori asal-usul manusia tersebut, jemaat juga menghadapi masalah teknologi kloning pada manusia dari aspek bioetika. Belum lagi masalah gender dan keadilan,¹⁸ juga masalah narkoba. Kalau hal-hal tersebut ditanyakan oleh jemaat, apakah para rohaniwan sebagai pemimpin Kristen—yang merupakan hasil dari pendidikan teologi—telah siap menjawab?

¹⁶“Menggagas Pendidikan Agama Inklusif,” *Kompas* (12 Juli 2002) 42.

¹⁷“‘Bertemu’ Nenek Moyang Manusia,” *Kompas* (20 Juli 2002).

¹⁸Linda E. Thomas, “Into the New Millennium: The Impact of the Academy on the Church,” *Quarterly Review* 20/2 (Summer 2000).

Catatan-catatan kelemahan pelayanan para rohaniwan di tempat kerja di atas jelas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan upaya pendidikan calon rohaniwan di sekolah teologi yang merupakan uraian selanjutnya.

KETERBATASAN UPAYA PENDIDIKAN TEOLOGI

Keterbatasan upaya pendidikan teologi itu dapat dilihat pada diri para pengajar, kurikulum, sumber belajar (antara lain, perpustakaan), sarana pendukung belajar, iklim komunikasi dan interaksi belajar mengajarnya, proses pendidikan dan juga pelaksanaan evaluasinya. Harus diakui bahwa tidak semua perlengkapan pelayanan dapat diajarkan di sekolah teologi, bukan hanya mengenai bagaimana belajar mengelola diri dan tuntutan penggembalaan, baik itu relasi dengan anggota gereja, staf, dan konselor; stres urusan keluarga; tekanan keuangan; dan kesejahteraan emosi seperti yang dibahas oleh Paul Meier, Frank Minirth serta kawan-kawan.¹⁹ Ada hal-hal lain selain itu misalnya, tentang kesukaran bekerja sama khususnya dengan rekan belajar dan rekan kerja sesama calon rohaniwan dan antarrohaniwan sealmamater. Masalah itu tampaknya telah menjadi “rahasia umum abadi” di gereja-gereja dan lembaga Kristen yang agaknya belum berhasil dicapai oleh sekolah-sekolah teologi. Belum lagi kesukaran bekerja sama dengan penatua gereja, pengurus lembaga Kristen, rekan kerja sepelayanan dari sekolah teologi lain dalam kerangka ekumene, jemaat, dan hidup bermasyarakat dalam konteks kemajemukan yang jelas tidak mudah diajarkan di sekolah teologi.

Dalam tulisan ini, keterbatasan penyiapan calon rohaniwan oleh sekolah teologi dilihat mulai dari model dan pendekatan pendidikan yang dianut oleh sekolah tersebut untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khususnya; kekompakan para pengajarnya untuk bertindak sesuai dengan pendekatan yang dianut dan peraturan yang berlaku di sekolah teologi yang diterapkan mulai dari penyeleksian, proses pendidikan dan evaluasinya, termasuk kerja sama dengan berbagai gereja dan lembaga Kristen dalam mendidik dan mengevaluasi calon untuk menetapkan kelulusannya.

Keterbatasan Mewujudkan Pendekatan dan Model Pendidikan Teologi

Menurut Banks²⁰ ada dua isu utama pendidikan sekolah teologi yang didiskusikan sampai pertengahan tahun 1980-an dan ada sebagian sekolah teologi yang sampai tahun 1999-an masih mendiskusikannya. Yang pertama adalah mengenai sarana dan tujuan; sumber dana; sistem pengelolaan;

¹⁹*What They Didn't Teach You in Seminary* (Nashville: Thomas Nelson, 1993).

²⁰*Reenvisioning Theological Education* 8-9.

prioritas akademik sebagai tanggung jawab utama pengajar dan peserta didik; pengembangan profesionalitas pengajar, staf, dan dewan pengawas sekolah. Kedua, mengenai tujuan umum dan tujuan khusus sekolah teologi dan ketercapaiannya; keseimbangan antara formasi spiritual, pengembangan profesional, dan keunggulan akademik; keterkaitan dengan konteks gereja yang dilayani; perhatian pada kekhasan diri dan studi banding; pengalaman kemasyarakatan, dan keikutsertaan minoritas. Kedua isu ini lebih dilihat bersifat operasional dengan pertanyaan: Seberapa baik sekolah teologi telah berbuat secara akademik dan administrasi? Dengan kata lain, pendekatan usaha pendidikannya bersifat pragmatis dan tidak reflektif secara teologis.

Banks²¹ melanjutkan dengan menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 1985-an sampai tahun 2000, diskusi lebih ditekankan pada berpikir secara teologis yang sebenarnya telah dikemukakan oleh Richard Niebuhr pada 1956 dalam tulisannya, *“The Purpose of the Church and Its Ministry: Reflections on the Aims of Theological Education.”* Niebuhr menekankan sangat pentingnya pemikiran secara teologis, bukan hanya yang bersifat kepragmatisan, kependidikan, ke-sosial-psikologis-an mengenai pendidikan teologi. Masalah penekanan dari pendekatan tertentu dalam pendidikan teologi inilah yang agaknya telah menjadi salah satu “ajang persaingan para pengajar di sekolah teologi” yang ditemukan Ferris dalam penelitiannya di lapangan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Berpikir secara teologis membawa pada perspektif baru dalam melihat sarana dengan tujuan, dan mulai mempertanyakan kemampuan seorang lulusan sekolah teologi dalam menginterpretasi Alkitab ke dalam konteks yang berbeda dengan konteks lingkungan sekolah teologi tempat ia belajar. Tetapi, ditegaskan Banks, berpikir secara teologis tersebut juga tidak mengubah operasional banyak sekolah teologi. Pendidikan teologi tetap lebih berkarakter akademik.

Sebelum mengemukakan model misional sebagai model alternatif rancangannya untuk memajukan pendidikan teologi dengan pendekatan Alkitab sebagai pusat pendidikan teologi, Banks²² memaparkan lebih dahulu karakteristik beberapa model pendidikan teologi secara ringkas. Model klasikal menekankan formasi teologis untuk mencapai kecenderungan berpikir teologis dalam seluruh aspek kehidupan. Model ini juga membentuk karakter spiritual dan moral, serta memberikan arah untuk tindakan pelayanan; memperhatikan proses iman Kristen, intelektual dan moral; fokus pada kebijaksanaan kognitif. Model vokasional, dengan kisah Kristen, menekankan interpretasi teologis, pengembangan keterampilan

²¹Ibid. 10.

²²Ibid. 143.

dalam menghubungkan tradisi dengan isu kontemporer yang juga mempengaruhi identitas, nilai, serta membentuk batasan dan praktek pelayanan; memperhatikan tujuan reflektif dan praktis dari cerita Kristen dan karenanya fokus utamanya adalah perolehan ketajaman kognitif. Model dialektikal menekankan pembentukan lingkungan visi atau praktis yang berpusat pada Allah yang juga mempengaruhi kehidupan pribadi, bidang layanan dan sosial; memperhatikan etos (karakter pribadi atau kelompok) dalam berpikir atau bertindak; fokus pada perolehan kognitif dan *insight*. Model konfesional menekankan informasi teologis untuk mendapatkan pemahaman keyakinan Kristen yang memberikan bentuk sistematis pada keyakinan Kristen dan memberikan arah bagi pertumbuhan pribadi dan praktek pelayanan; berkepentingan dengan isi doktrin dan etika wahyu Allah; fokus pada pengetahuan kognitif. Tampaknya, model-model tersebut tetap lebih berorientasi kognitif walaupun ada model yang ingin menyeimbangkan formasi personal, intelektual dan profesional.

Bahasan berikut adalah model misional pendidikan teologi yang dikemukakan Banks dalam bukunya, *Reinventing the Seminary: Exploring a Missional Model of Theological Education*, yang dikutip oleh Howard.²³ Menurut Howard, pendidikan teologi model misional menekankan teologi misi pada kerekanan yang aktif dalam pelayanan, berdasarkan interpretasi tradisi dan refleksi pada praktek dengan dimensi spiritual dan kepentingan umum yang kuat. Dari sudut pandang ini, sekolah teologi, terutama, memperhatikan *kepekaan pelayanan* dan *pentranformasian ladang pelayanan* dan karenanya fokus utamanya ditujukan pada ketaatan dalam proses belajar kognitif, spiritual-moral, dan praksis. Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah model misional yang menjadikan Alkitab sebagai pusat tidak juga akan berakhir seperti pernyataan Banks sebelumnya berkenaan dengan pendekatan teologis, bahwa berpikir secara alkitabiah juga tidak mengubah operasional banyak sekolah teologi?

Keterbatasan dalam Penyeleksian Calon Peserta Didik

Judy Tenelshof,²⁴ asisten profesor pendidikan Kristen di Talbot School of Theology, mengemukakan bahwa tidak terlalu lama lagi sekolah teologi tidak dapat lagi berasumsi bahwa peserta didik barunya mempunyai pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang cukup. Tantangan yang harus dihadapi sekolah teologi dari peserta didik barunya mencakup “keterbelahan diri,” “lemahnya komitmen pribadi,” “model latihan *reason-oriented* versus

²³“Theological Education: Perspectives from the Literature” 9-27.

²⁴“Encouraging the Character Formation of Future Christian Leader,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 42/1 (March 1999) 77-89.

person-oriented,” “dari keluarga yang tidak ada kejujuran, empati, perhatian, dan tidak menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yang dibesarkan.” Dengan peserta didik baru yang berkarakter demikian pada waktu-waktu mendatang jelas akan menambah kesulitan para pengajar dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Banks.²⁵ Kemudian Tenelshof mengemukakan langkah-langkah untuk menghadapi masalah tersebut sebagai upaya formasi karakter di Talbot School of Theology dalam rangka menyiapkan calon rohaniwan pelayan gereja masa depan. Hasil sementara dinyatakan cukup menggembirakan, tetapi belum jelas keajekan hasil tersebut dalam jangka panjang.

Paparan dugaan di atas menunjukkan keterbatasan pihak sekolah teologi untuk mengetahui “ke-siapa-an” peserta didik yang kelemahan dan kekurangannya tidak menghambat dirinya untuk menjadi rohaniwan yang dapat menjadi berkat bagi yang dilayani. Edward Farley, seperti dikutip Banks, menyatakan bahwa hampir tidak ada sekolah teologi yang dapat memperkirakan segala sesuatu mengenai latar belakang pendidikan peserta didik baru yang diterimanya kecuali fakta gelar akademik yang terlihat.²⁶ Jika latar belakang pendidikan peserta didik dalam ranah kognitif saja tidak dapat diketahui penuh oleh pihak sekolah teologi, apalagi pengalaman ranah afektif dan perilakunya. Dalam kedua hal terakhir ini, sekolah-sekolah teologi harus mengakui bahwa, di satu pihak, mereka sering “tanpa sengaja telah meloloskan calon yang tidak ‘dipanggil’ ” karena keterbatasan dalam penyeleksian calon peserta didik baru; dan, di lain pihak, dengan diterimanya sejumlah calon peserta didik yang kemudian menjadi rohaniwan yang baik, hal tersebut juga tidak dapat dinilai sebagai keberhasilan usaha mereka dalam menyeleksi. Berangkat dari penggambaran kondisi calon peserta didik di atas, pertanyaannya adalah: Apakah sekolah teologi “sanggup mengubah” karakter peserta didik barunya yang sudah terbentuk dalam waktu yang relatif cukup lama? Kalau “sanggup mengubah,” apakah hal itu dapat dilakukan oleh sekolah teologi dalam kurun waktu studi peserta didik yang relatif singkat?

Keterbatasan dalam Proses Pendidikan dan Hasilnya

Model misional pendidikan teologi yang dikemukakan Banks²⁷ memiliki dua elemen dasar yang berhubungan, yaitu antara aksi dan refleksi, dan antara teori dan praktek. Pendekatan ini melihat belajar melayani melalui refleksi praktis maupun praktis reflektif. Pendekatan ini, di satu pihak,

²⁵Banks, *Reenvisioning Theological Education* 191.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid. 157.

mementingkan belajar Alkitab, sejarah, dan teologi, dan di lain pihak, pembelajaran tersebut diproses dalam pemformasian dan orientasi pada kehidupan nyata. Belajarnya diacu pada semua dimensi dasar kehidupan manusia, mencakup keluarga dan persahabatan, kerja dan hubungan dengan sesama, gereja dan organisasi Kristen, keterlibatan sukarela dan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, pendekatan ini bukan mendidik calon rohaniwan *untuk* pelayanan, tetapi mendidik calon rohaniwan *dalam* pelayanan. Banks²⁸ mengemukakan lebih lanjut bahwa mendidik calon rohaniwan dalam kerohanian berarti tidak secara langsung terfokus pada formasi spiritual, memperantarai tradisi Kristen, memperlengkapi keterampilan kepemimpinan, mempraktekkan kesaksian Kristen. Sebaliknya, konsentrasi harus diarahkan pada pengembangan kebiasaan kritis refleksi diri pada formasi spiritual, iman, kualitas kepemimpinan, dan praktek yang secara tidak langsung mempengaruhi area penting dari kehidupan dan pelayanan ini.

Untuk mewujudkan model misional ini, Banks²⁹ menyatakan bahwa relasi antarpengajar seharusnya tidak menekankan profesionalitas tetapi lebih berdasarkan kerekanan. Banks, mengutip Peter Brown, menyatakan bahwa Agustinus adalah contoh pengajar yang bersikap demikian. Pengajar seperti ini, menurut pendapat David F. Wells yang juga dikutip Banks, yang tidak peduli apa disiplinnya tetapi dapat berpikir dalam kerangka teologis, sangat jarang ditemukan. Kesulitan tersebut bertambah, seperti dikatakan Cornel West,³⁰ jika ingin terjadi perubahan di sekolah teologi maka “tempat memulai yang terbaik adalah pada yang paling cepat tersinggung dan yang paling sukar, yaitu gambar diri dan identitas diri para pengajar sekolah teologi.” Dalam hubungan antara pengajar dan peserta didik, model misional menggunakan pendekatan partisipasi dalam kegiatan belajar-berbuat yang melihat peserta didik lebih sebagai rekan junior daripada sebagai murid. Pendekatan partisipasi tampaknya merupakan pendekatan yang cukup efektif untuk mendidik kemampuan bekerja sama dalam diri peserta didik. Tetapi, hal-hal tersebut jelas tidak mudah diwujudkan dalam sekolah teologi.

Untuk lebih menyadari keterbatasan, ada baiknya proses pendidikan teologi juga ditinjau dari konsep pengajaran sekuler. Bruce Joyce dan Marsha Weil menyatakan bahwa dalam setiap model pengajaran ada efek-efek instruksional (pengajaran) dan efek-efek *nurturant*-nya (pengasuhan).³¹ Efek instruksional lebih bersifat langsung atau segera, umumnya berkaitan

²⁸Ibid. 159.

²⁹Ibid. 186.

³⁰Ibid. 169.

³¹*Models of Teaching* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980).

dengan ranah kognitif mulai dari tingkat pengingatan sampai tingkat aplikasi, dan ranah psikomotorik (menurut taksonomi Bloom). Untuk mencapai efek ranah kognitif tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi, terlebih lagi efek ranah afektif, jelas diperlukan gabungan efek instruksional dengan *nurturant* yang membutuhkan waktu relatif panjang. Secara khusus, keterbatasan pendidikan ranah afektif perlu dikemukakan. *Pertama*, pengajaran ranah afektif tidak bisa diberikan contoh langsung pada saat pengajaran seperti pengajaran ranah kognitif dan psikomotorik. *Kedua*, pengajaran ranah afektif tidak bersifat *pengulangan* suatu sikap atau tindakan, tetapi bersifat *keputusan-keputusan* dalam diri peserta didik yang harus diambilnya. *Ketiga*, karena bersifat keputusan dan bukan pengulangan yang menjadi suatu keterampilan, maka penilaian ranah afektif pada hakikatnya hanya sampai saat dinilai dan tidak dapat diprediksi untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian, yang dapat diharapkan pada ranah afektif peserta didik hanyalah kecenderungan, bukan kepastian. “Jaminan mutu” ranah afektif tidak dapat diberikan pada lulusan sekolah teologi mana pun karena justru di situlah letak keterbatasannya.

Bagaimana hasil proses pendidikan sekolah teologi? Banks³² mengungkapkan hasil survei seminari-seminari tahun 1992 yang menunjukkan bahwa kurang dari 40% peserta didik teologi yang menyatakan pengalaman mereka telah membantu pertumbuhan rohani mereka. Temuan ini jelas tidak menggembirakan. Kendati ada sekolah-sekolah teologi yang memberikan perhatian pada formasi personal, tetapi terwujudnya lebih bersifat reaktif daripada proaktif, terpotong-potong daripada terkoordinasi, pinggiran daripada perhatian utama. Walaupun merupakan salah satu dari tiga tujuan utama pelatihan pelayanan, formasi personal tetap mendapatkan prioritas lebih rendah dari pengutamaan akademik dan pengembangan profesional.

Dalam suatu survei yang dilakukan oleh Ferris³³ pada beberapa seminari, terlihat betapa baiknya program dan usaha sekolah teologi dalam menyiapkan calon rohaniwan untuk menjadi pemimpin-pelayan di gereja, tetapi hasil akhirnya “tidak menggembirakan.” Menurut Banks,³⁴ formasi personal tidak dapat dikembangkan melalui program khusus atau bahkan melalui ibadah rutin yang umumnya diprogramkan di sekolah-sekolah teologi. Formasi personal kebanyakan terjadi sebagai hasil dari *peragian contoh personal* pengajar dan figur kunci, baik pimpinan administrasi ataupun mahasiswa yang menjadi pimpinan atau yang sudah senior. Dalam

³²*Reenvisioning Theological Education* 200.

³³*Ibid.* 224.

³⁴*Ibid.* 201.

hal ini jelas ada keterbatasan untuk mewujudkannya karena yang disebut teladan, baik bagi pengajar maupun bagi peserta didik senior, umumnya lebih pada sekitar aspek “hukum,” yaitu “tidak melanggar” ketentuan operasional sekolah. Penulatan contoh hidup yang konsisten, khususnya ranah afektif spiritual-moral-sosial, sering kali makin berkurang pada tingkat para senior. Yang dikatakan teladan belum sampai pada “integritas diri yang diakui.” Hal ini tampaknya juga berlaku di tempat pelayanan.

Dalam proses kerja sama dengan gereja untuk mendidik calon rohaniwan yang biasanya oleh sekolah teologi dibelajarkan, dipraktekkan atau dimagangkan di gereja-gereja dan lembaga Kristen lainnya, Hough dan Cobb³⁵ menyatakan bahwa praktek tahunan setelah tamat dari sekolah teologi pun tidak cukup. Dikotomi teori dan praktek tetap ada jika refleksi teologi belum menjadi bagian organik dari keseluruhan kurikulum. Lebih lanjut menurut Hough dan Cobb,³⁶ magang seharusnya sudah dilaksanakan di tengah-tengah berlangsungnya proses pendidikan dan bukan pada akhir pendidikan; bukan hanya orang lain yang dijadikan model, tetapi juga para pengajar. Banks³⁷ mengungkapkan banyak pembicaraan mengenai adanya “jurang” antara sekolah teologi dan gereja yang sebagian disebabkan oleh kurangnya para pengajar sekolah teologi yang memiliki pengalaman pelayanan. Kekurangan dalam kerja sama dengan gereja dalam mendidik calon rohaniwan juga merupakan keterbatasan sekolah teologi.

Keterbatasan Upaya Evaluasi

Setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai kriteria untuk menetapkan lulus tidaknya seorang peserta didik yang belajar di lembaga tersebut. Kriteria tersebut jelas merupakan penjabaran dari tujuan resmi yang dirumuskan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tujuan resmi, yang sering disebut tujuan umum itu, biasanya rumusannya “terlalu umum” sehingga sulit dievaluasi. Sebagai contoh, ambil salah satu rumusan tujuan yang kelima dari TEDS:³⁸ “*To model Christlike character in our community life, which is a necessary foundation for effective ministry,*” jelas sukar dievaluasi. Bagaimana mengevaluasi langsung model *Christlike* karakter? Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, dan Stan L. Albrecht,³⁹ menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan umum semacam itu hampir tidak mungkin.

³⁵Dikutip dari Banks, *ibid.* 26.

³⁶Dikutip dari Banks, *ibid.* 133.

³⁷*Ibid.* 11.

³⁸Katalog TEDS 2000-2001.

³⁹“Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial,” (IKIP Semarang, 1991) I.322-323.

Karenanya, dinyatakan Chadwick dan kawan-kawannya, lembaga mengganti tujuan umum tersebut dengan tujuan yang bisa dicapai atau memusatkan diri pada pelaksanaan program (bukan pada tujuan program) sebagai tujuan-tujuan pengganti. Alat evaluasi yang biasa diberikan sekolah-sekolah teologi kepada gereja-gereja dan lembaga Kristen tempat peserta didik magang, jelas berisi butir-butir kriteria yang merupakan tujuan-tujuan pengganti yang kemungkinan “sudah membelok” atau “menggantikan” tujuan umum yang harus dicapai. Atau, kalau dibalik, “jika butir-butir kriteria evaluasi itu mendapat nilai baik semua sekalipun, hal itu tidak sama artinya dengan mengatakan bahwa ‘tujuan umum’ sudah tercapai.”

Lebih lanjut adalah mengenai evaluasi terhadap ranah-ranah kualifikasi seorang rohaniwan. Untuk sekolah teologi yang mendidik calon rohaniwan harus diakui bahwa penilaian ranah afektif jauh lebih sulit dari penilaian ranah kognitif dan ranah praksisnya. Penilaian ranah praksis lebih sulit dari penilaian ranah kognitif. Penilaian ranah kognitif dapat dilakukan melalui tes dan tugas yang diberikan setiap pengajar, termasuk keterampilan berkhotbah yang mencakup ranah kognitif dan praksis. Untuk mengevaluasi ranah afektif di lembaga pendidikan sendiri agaknya, secara umum, hanya sampai pada batas aspek “hukum,” yaitu “ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan sekolah atau keonaran lain yang dibuatnya.” Mengenai seberapa tinggi kesungguhan peserta didik bermeditasi pagi, beribadah atau mengikuti persekutuan doa yang umumnya diprogram oleh sekolah-sekolah teologi, tidak ada alat yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Untuk ranah praksis keterampilan memimpin dan atau bekerja sama dalam suatu bidang tugas yang diberikan kepadanya, memimpin kelas penyelidikan Alkitab (PA) dan atau kelas sekolah minggu, tidak dapat tidak, harus dilakukan bersama dengan lembaga tempat peserta didik magang. Bahkan ada gereja yang menganggap sekolah teologi hanya bisa memajukan pelayanan peserta didiknya secara bertahap dan tidak dapat mendidiknya sampai pada tingkat “siap pakai” untuk pelayanan. Jemaatlah yang dianggap harus menilai kapasitas seseorang apakah ia dapat atau tidak dapat melayani, bukan seminari-seminari.⁴⁰ Dalam hal ini, pihak sekolah teologi terbatas kemampuannya untuk memberi kriteria dan cara mengevaluasi yang “sesuai dengan kategori kurikulumnya” pada pihak gereja tempat peserta didiknya magang karena sekolah teologi juga tidak mampu melakukan hal tersebut.

⁴⁰Banks, *Reenvisioning Theological Education* 136.

Beranjak dari semua uraian di atas sekolah teologi harus mengakui bahwa kelemahan pelayanan para lulusannya terkait dengan keterbatasannya dalam mendidik dan mengevaluasi kualifikasi kelulusan seorang calon rohaniwan. Lebih lanjut, “jaminan mutu” tidak dapat diberikan pada lulusan sekolah teologi mana pun. Di sini, muncul kembali pertanyaan: Mengapa lulusan sekolah teologi yang tidak memiliki klaim “jaminan mutu” tetap diterima oleh lembaga “pemakai”?

PENUTUP

Mengamati keterbatasan-keterbatasan upaya mendidik calon rohaniwan dari sekolah-sekolah teologi yang telah dikemukakan sebelumnya kita dapat memahami “keputusasaan” yang dikemukakan oleh Kalal dalam tulisannya. Setelah mengemukakan berbagai perubahan paradigma atau model dalam pendidikan teologi yang dibuat untuk memajukan sekolah teologi dalam penyiapan calon rohaniwan pemimpin Kristen, pada bagian akhir tulisannya Kalal menyatakan dirinya *frustrasi* dengan menyatakan, “*But, there is still trouble. . .*”⁴¹ Dikatakannya, ketika ia sendiri berusaha membuat suatu model, ia menjadi semakin frustrasi. Agaknya Kalal, dalam semangat tanggung jawabnya, harus membedakan antara belum diketemukannya model pendidikan teologi yang memadai dan lulusan sekolah teologi yang terbatas kualifikasinya namun tetap diterima oleh lembaga “pemakai,” yang harus diakui ada “polesan tangan” Roh Kudus pada diri lulusan tersebut.

Berangkat dari kerja Roh Kudus melalui Alkitab yang dipelajari umat Kristen, Banks⁴² mengingatkan bahwa pekerjaan mengajar juga dapat dilihat dari perspektif ini. Apa yang dikerjakan oleh para pengajar bukan hanya mendapat pengenalan diri dari Tuhan sendiri yang memberi sasaran model tetapi juga kuasa-Nya. Kegiatan itu harus dilakukan lebih bersandar pada anugerah Allah daripada usaha manusia. Craig Dykstra⁴³ mengingatkan bahwa sekolah teologi tidak bertanggung jawab menjadikan orang untuk melayani. Pendekatan pendidikan teologi harusnya dilakukan berdasar pada anugerah bukan pada basis kerja semata-mata.

Pendekatan berbasis anugerah yang dikemukakan Dykstra di atas jelas sejajar dengan *Manifesto* (pernyataan terbuka) Pembaharuan Pendidikan Teologi Injili tahun 1990,⁴⁴ hasil pertemuan ICCA (International Council of Accrediting Agencies for Evangelical Theological Education) tahun 1981

⁴¹Kalal, “We’ve Got Trouble.”

⁴²*Reenvisioning Theological Education* 173.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Evangelical Review of Theology* 19/3 edisi kedua (July 1995).

di Chongoni, Malawi, sebuah negara republik di Afrika Timur. Manifesto pembaharuan pendidikan teologi Injili tersebut sangat menarik karena pada akhir setiap pernyataan komitmen yang meliputi (1) *Contextualisation*; (2) *Churchward Orientation*; (3) *Strategic Flexibility*; (4) *Theological Grounding*; (5) *Continuous Assessment*; (6) *Community Life*; (7) *Integrated Programme*; (8) *Servant Moulding*; (9) *Instructional Variety*; (10) *A Christian Mind*; (11) *Equipping for Growth*; (12) *Cooperation*, selalu diakhiri dengan pernyataan: “*This must we accomplish by God’s grace.*” Manifesto tersebut mengakui bahwa semua upaya pendidikan teologi hanya dapat dilakukan dengan bersandar pada anugerah Allah.

Akhir kata dari semua paparan keterbatasan upaya mendidik calon rohaniwan yang telah dilakukan sekolah teologi, disadari bahwa *track record* penerimaan lulusan sekolah teologi oleh lembaga-lembaga “pemakai” semata-mata hanyalah anugerah Allah, bukan hasil upaya lembaga pendidikan yang memang merupakan tanggung jawabnya.